

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Australia dapat kita katakan sebagai sekutu Amerika Serikat yang paling setia setelah Inggris. Australia secara tegas mendukung kebijakan-kebijakan Amerika Serikat, terutama dalam hal / bidang pertahanan dan militer, terhitung sejak Perang Dunia II, Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Teluk 1991, hingga perang di Afghanistan dan Irak. Bagi Australia, keikutsertaan negaranya dalam perang Irak tahun 2003 lalu bukanlah perang Australia bersama Amerika Serikat yang pertama kali. Sebagai realisasi dari dukungan pemerintah Australia terhadap kebijakan Amerika Serikat menginvasi Irak, ribuan personel militer Australia dikirim dan ikut bergabung dalam pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat untuk melakukan serangan militer terhadap Irak.

Invasi Irak, tahun 2003, dengan kode "Operasi Pembebasan Irak" secara resmi dimulai oleh Amerika Serikat pada tanggal 19 Maret 2003. Adapun tujuan-tujuan resmi yang ditetapkan Amerika Serikat adalah untuk "melucuti senjata pemusnah massal Irak, mengakhiri dukungan Saddam Hussein kepada terorisme, dan memerdekakan rakyat Irak". Sebagai persiapan, pada tanggal 18 Februari 2003, sebanyak 100.000 tentara Amerika Serikat dimobilisasikan di Kuwait.

Australia ikut bergabung dengan tentara koalisi pimpinan AS, yang

sejumlah sasaran di seluruh Irak. Tanggal 20 Maret 2003 (19 Maret menurut waktu Amerika Serikat) merupakan hari pertama Operasi Pembebasan Irak, yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan Ba'athist di bawah kepemimpinan Saddam Hussein.

Banyak pernyataan-pernyataan yang diucapkan oleh Perdana Menteri John Howard secara jelas menunjukkan dukungannya atas serangan Amerika Serikat terhadap Irak dan memperlihatkan komitmennya terhadap hubungan aliansinya dengan Amerika Serikat. Keputusan pemerintah Australia itu mendapat kritikan dari masyarakat internasional dan reaksi protes keras dari masyarakat domestiknya sendiri, namun Perdana Menteri John Howard tetap pada komitmennya untuk melaksanakan doktrin *pre-emptive* dan mengirim pasukannya ke Irak. Memang, sejak pertama kali Presiden Bush mengatakan niatnya untuk melakukan invasi ke Irak, PM John Howard adalah orang pertama yang menyatakan dukungannya. Padahal Tony Blair selaku Perdana Menteri Inggris pada waktu itu meminta tenggang waktu untuk berpikir terlebih dahulu sebelum akhirnya ia menyatakan mendukung rencana AS untuk melakukan serangan ke Irak tersebut. Dan pada pertengahan bulan Januari 2003, Australia tentunya di bawah pemerintahan PM John Howard mengirimkan 2000 tentara dari unit-unit Angkatan Laut dan Angkatan Udara ke Teluk tanpa referensi dari parlemen.

Pengiriman pasukan Australia ke Irak ini pun menjadi bahan perdebatan, karena protes tidak hanya datang dari luar negeri, akan tetapi juga terjadi di dalam negeri Australia sendiri, mulai di antara kalangan masyarakat biasa hingga orang-

menyetujui atau tidak menyetujui kebijakan tersebut. Terlepas dari perdebatan-perdebatan tersebut, pemerintah Australia tetap saja mengirimkan pasukannya sebanyak sekitar 2.000 personil angkatan bersenjata Australia (Australian Defence Force / ADF), tentara-tentara Australia tersebut dikirim untuk membantu tentara Amerika Serikat berperang di Irak. Australia menjadi negara terbesar ketiga yang mengirim pasukan ke Irak setelah Amerika Serikat dan Inggris.

Perdana Menteri Howard tetap meyakini pentingnya aliansi Australia dengan AS, khususnya dalam perang melawan terorisme. Dalam Joint Meeting dengan Kongres AS pada Juni 2002, PM John Howard menegaskan:

*"We have taken our place beside you in the war against terrorism, knowing beyond all doubt that it was an attack upon ourselves and our way of life as surely as it was upon your own. America has no better friend anywhere in the world than Australia"*

Dibalik pernyataan / argumen tersebut dapat terlihat bahwa Australia ingin dianggap sebagai warga internasional yang baik, Australia ingin mempererat koalisi / aliansi dan hubungan yang baik dengan Amerika Serikat. Australia ingin memberikan kontribusi besar yang tercermin dalam pengambilan keputusan pengiriman pasukan tersebut. PM John Howard juga menegaskan bahwa dukungan Australia terhadap Amerika Serikat dalam invasi ke Irak adalah sekaligus merupakan kepentingan nasional Australia. Kebijakan PM John Howard

Ketidakpuasan masyarakat Australia atas kebijakan pemerintahnya mengenai invasi ke Irak juga didukung oleh para mantan elit Australia. Pada September 2002 mantan Gubernur Jenderal Bill Hayden, mantan Perdana Menteri (seperti Gough Whitlam, Malcolm Fraser, dan Hawke), mantan elit militer seperti Jenderal Peter Gration (mantan Kepala Angkatan Pertahanan Australia), Laksamana Alan Beaurmont, dan Admiral Michael Hudson, mantan pemimpin Partai Liberal John Hewson dan Kepala RSL Mayor Jenderal Peter Philips muncul di depan publik dan menyeru kepada PM John Howard untuk menolak upaya penyerangan Amerika Serikat ke Irak.

Kebijakan Pemerintah Australia dalam memberikan dukungan kepada Amerika Serikat, sekaligus melibatkan negaranya untuk ikut serta dalam invasi ke Irak tahun 2003, kendati mendapat tentangan dari publik / masyarakat Australia sendiri, adalah dilatarbelakangi oleh elemen-elemen dalam negeri dan luar negeri Australia, karena bagaimanapun juga elemen dalam negeri secara riil juga turut mempengaruhi kebijakan Pemerintah Australia yang berkonsekuensi ke luar negeri.

Peranan Perdana Menteri sangat sentral dan penting dalam perpolitikan Australia. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan eksekutif sehari-hari. Dia menjadi pusat perhatian media dalam panggung politik Australia, sehingga segala sepak terjang seorang Perdana Menteri dapat dengan cepat diketahui dan tersebar di masyarakatnya. Dalam menjalankan pemerintahan, Perdana Menteri memegang kekuasaan yang sangat

tetapi beberapa kekuasaan penting lainnya dilakukan secara sepihak. Adapun Alexander Downer merupakan Menteri Luar Negeri di era kepemimpinan Perdana Menteri John Howard. Ia menjabat sebagai menteri luar negeri selama empat kali periode masa kepemimpinan Howard. Bisa jadi Alexander Downer merupakan orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Perdana Menteri John Howard. Alexander Downer berasal dari Partai Liberal. Selama menjabat sebagai menteri luar negeri, Alexander Downer sering memberikan *general support* bagi pendekatan unilateralis yang dilakukan oleh pemerintahan George W. Bush. Ia juga yang mendukung kebijakan Howard untuk mengirimkan pasukan tempur beserta armada laut Australia untuk mendukung invasi Amerika Serikat ke Irak di tahun 2003 ini dan ia pulalah yang mempertahankan *claim* bahwa *weapons of mass destruction* akan ditemukan di Irak. Howard dan Downer amat gigih mendukung Amerika Serikat dengan mengirimkan pasukannya ke Australia serta membenarkan adanya senjata penghancur massal tersebut, meskipun sebagian besar rakyat Australia menentang habis-habisan keputusan tersebut.

Meskipun begitu, selama masa pemerintahannya, Howard telah mendominasi masalah pertahanan. Hal ini banyak diungkapkan oleh anggota parlemen dan dari protes warga Australia sendiri dari dalam negeri. Selain itu arah kebijakan luar negeri Howard begitu rapat dengan pemerintahan Amerika Serikat yang pada waktu itu dipimpin oleh Bush. Pemerintah Australia ingin mendekatkan diri dengan pihak Amerika Serikat untuk mendapatkan keuntungan,

Dalam kasus invasi ke Irak, partai yang mendukung kebijakan ini adalah tentu saja Partai Liberal yang juga sebagai partai yang menghantarkan John Howard sebagai Perdana Menteri Australia sejak tahun 1995, menggantikan Alexander Downer, yang hanya menjabat sebagai Perdana Menteri Australia dalam kurun waktu setahun (1994-1995). Ideologi partai yang juga dipegang oleh John Howard sendiri memiliki tradisi yang kuat pada hubungan dengan negara-negara Barat, khususnya negara Amerika Serikat dan Inggris.

Peristiwa 11 September 2001, menjadi titik awal bagi negara-negara Barat dalam melakukan langkah-langkah dalam negeri (*domestic policies*) untuk menanggapi ancaman terorisme internasional, tidak terkecuali Australia. Kampanye gerakan antiterorisme (perang global melawan terorisme) pasca 11 September 2001, semakin menunjukkan kebencian barat terhadap dunia Islam. Terutama sejak serangan balasan Amerika terhadap kelompok fundamentalis Islam *Al-Qaeda* di Afganistan. Presiden dari Organisasi *Affinity Intercultural Foundation* di Australia, Mehmet Ozalp, mengatakan bahwa peristiwa 11 September merupakan titik awal perubahan pandangan global yang sangat mempengaruhi umat Islam di seluruh dunia dan di Australia.

..... Australia sebagai negara sekutu terdekat Amerika yang pada saat itu dipimpin oleh perdana menteri John Howard, berupaya merespon kondisi ancaman tersebut. Australia sebagai negara sekutu terdekat Amerika mengalami ketakutan yang sama. Terutama pada saat peristiwa bom Bali I dan Bom Bali II pada tahun 2002 hingga menewaskan sejumlah 88 warga Australia, memberikan

diwujudkan melalui peningkatan kebijakan keamanan negara berkaitan dengan ancaman terorisme dalam kebijakan anti-terorisme Australia.

Pemerintah Australia memperkenalkan perundang-undangan anti-terorisme baru yang berbeda-beda, sebagai bagian dari kampanye untuk menjamin keamanan Australia dan untuk memenuhi kewajiban internasional Australia. Dengan mengikuti arah kebijakan Amerika dalam agenda “perang global melawan terorisme”. Pemerintah Australia juga berupaya meyakinkan masyarakat nasional dan internasional bahwa Australia konsisten untuk menjaga perdamaian dari ancaman terorisme.

Howard kemudian memberikan inisiatif awal pembentukan kebijakan anti-terorisme pada hari Kamis, 25 Oktober tahun 2002, di Canberra. Howard berupaya mewujudkan kewajiban internasional Australia dalam mendukung “perang global melawan terorisme” dengan melakukan beberapa perubahan kebijakan keamanan nasional Australia, menjadi kebijakan anti-terorisme. Australia terus mengintensifkan kontribusinya terhadap internasional, dalam upaya pemberantasan terorisme dan dalam upaya meningkatkan keamanan secara domestik.

Amerika Serikat telah menjadi faktor penting dalam kebijakan pertahanan Australia selama lebih dari 60 tahun dengan pemberian jaminan keamanan yang kuat untuk Australia, termasuk penangkal nuklir yang diperluas. Postur pertahanan Australia diperkuat dengan akses ke intelijen Amerika Serikat. Selain itu, bidang pendidikan, senjata dan militer Australia juga mendapatkan perhatian dari Amerika Serikat.

Di sini kita perlu melihat, bahwa di balik hubungan dekat tersebut antara Australia dengan Amerika Serikat ternyata sudah ada perjanjiannya sejak dulu, yaitu dengan adanya sebuah pakta pertahanan yang bernama ANZUS (Australia, New Zealand, United States). Aliansi pertahanan ANZUS merupakan salah satu contoh dari organisasi pengaturan keamanan dalam kerangka *collective defense* / aliansi.

Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru menandatangani pakta pertahanan ANZUS pada tahun 1951. Pakta pertahanan ini menjadi satu-satunya aliansi pakta pertahanan Australia. Pakta pertahanan ANZUS dirumuskan di San Fransisco pada 1 september 1951 dan mulai berlaku pada 29 April 1952. Pakta ini mengikat para pesertanya untuk menyadari bahwa serangan bersenjata di wilayah pasifik oleh salah satu dari mereka dapat membahayakan perdamaian dan keselamatan yang lain. Dalam pakta ini ketiga Negara juga berjanji untuk mempertahankan dan mengembangkan kemampuan individu dan kolektif untuk menahan serangan. Pada tahun 1985, sifat aliansi ANZUS berubah setelah pemerintah Selandia Baru menolak akses kapal angkatan laut AS yang memiliki kemampuan senjata nuklir ke wilayahnya. Selandia Baru kemudian keluar dari perjanjian aliansi pertahanan ANZUS pada tahun 1985. Selandia Baru tidak setuju dengan sikap Amerika dan Australia yang mendukung dan menggunakan senjata nuklir sebagai senjata perang. Dalam memenuhi kewajiban ANZUS, Australia dan Amerika Serikat mengadakan kegiatan-kegiatan bersama, termasuk latihan



Berdasarkan rangkuman pembahasan-pembahasan mengenai aliansi Australia dan Amerika Serikat dalam invasi ke Irak tahun 2003 tersebut maka dapat terlihat bahwa faktor-faktor yang paling menonjol (yang paling kuat) dalam mendorong pemerintah Australia untuk ikut serta dalam invasi ke Irak 2003 adalah :

A. Ditinjau dari faktor “domestic politics” (keadaan domestik / kondisi dalam negeri Australia)

1. Australia merasa mempunyai hutang sejarah terhadap Amerika Serikat. Menurut PM John Howard, tidak ada satu negara pun kecuali Australia, yang senantiasa berperang bersama Amerika Serikat, sejak Perang Dunia II sampai Perang Irak. Adapun hutang sejarah dapat dikatakan pula sekaligus politik deposit bagi Australia agar sewaktu-waktu jika Australia membutuhkan dukungan / bantuan dapat meminta pertolongan dari Amerika Serikat.
2. Kondisi parlemen pada saat itu, di mana Partai Liberal adalah partai yang sedang berkuasa, dengan John Howard sebagai Perdana Menteri yang sedang menjabat merupakan kekuatan besar. Selain itu, Alexander Downer sebagai Menteri Pertahanan juga memiliki hubungan yang sangat dekat dan sangat pro dengan Howard-Bush. Ideologi Partai Liberal pun memiliki tradisi yang kuat pada hubungan

## B. Ditinjau dari faktor “international context

Dukungan dan keikutsertaan Australia dalam invasi ke Irak 2003 bersama Amerika Serikat dikarenakan adanya perjanjian atau pakta pertahanan ANZUS (Australia, New Zealand, United) yang bersifat mengikat. ANZUS sudah disepakati dan diresmikan pada September 1951. Partisipasi Australia dalam perang Irak merupakan salah satu tugas dan kewajiban Australia sebagai sekutu Amerika Serikat.